



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
UTARA

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

| Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses | Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis |
|---|---|
| 1. Rintisan <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>. | 1. Informasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah. |
| 2. Terkelola <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi. | 2. Interaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah. |
| 3. Terstandar-disasi <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi. | 3. Transaksi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. |
| 4. Terintegrasi dan Terukur <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif. | 4. Kolaborasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain. |
| 5. Optimum <ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas. | 5. Optimalisasi <ul style="list-style-type: none">• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. |

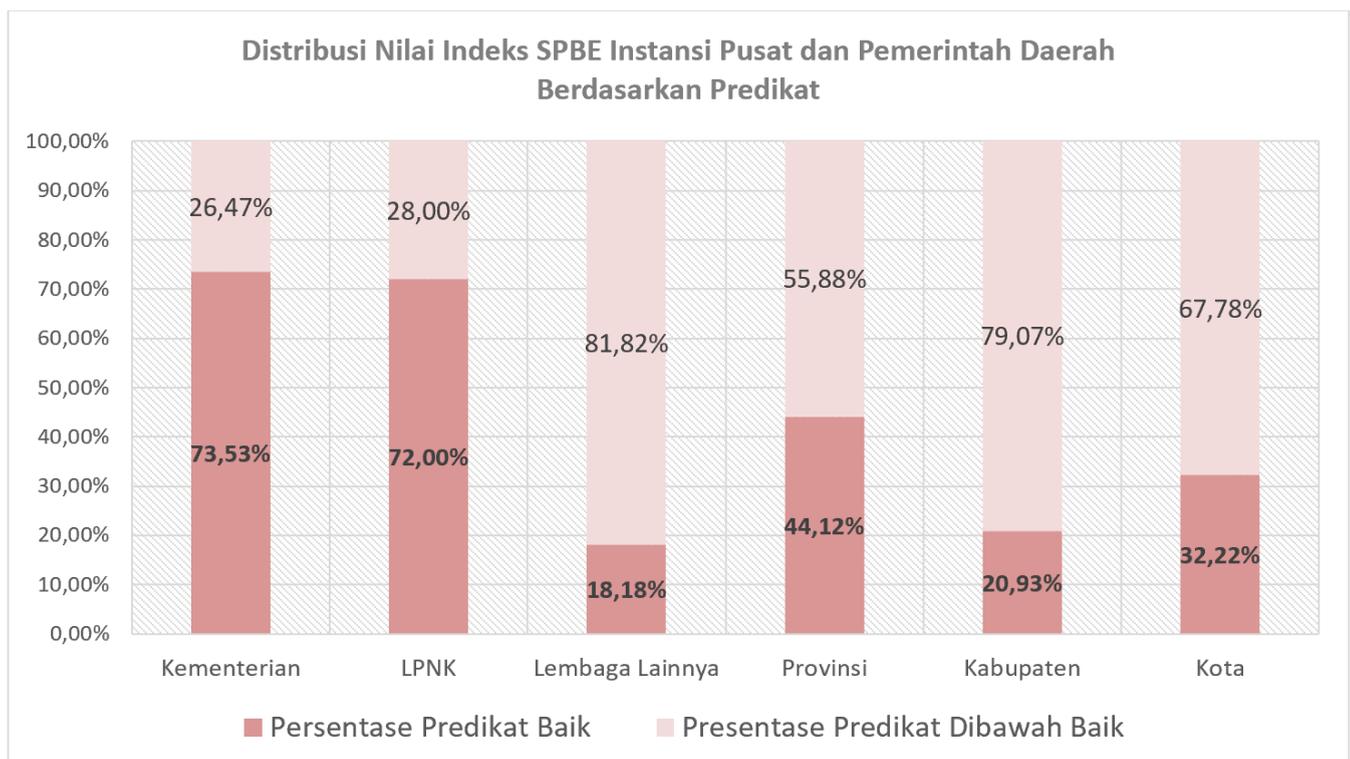
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

| Domain dan Aspek Penilaian | Bobot |
|---|--------------|
| Domain 1 - Kebijakan SPBE | 13% |
| Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE | 13% |
| Domain 2 - Tata Kelola SPBE | 25% |
| Aspek 2 - Perencanaan Strategis | 10% |
| Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi | 10% |
| Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE | 5% |
| Domain 3 - Manajemen SPBE | 16,5% |
| Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE | 12% |
| Aspek 6 - Audit TIK | 4,5% |
| Domain 4 - Layanan SPBE | 45,5% |
| Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,5% |
| Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik | 18% |

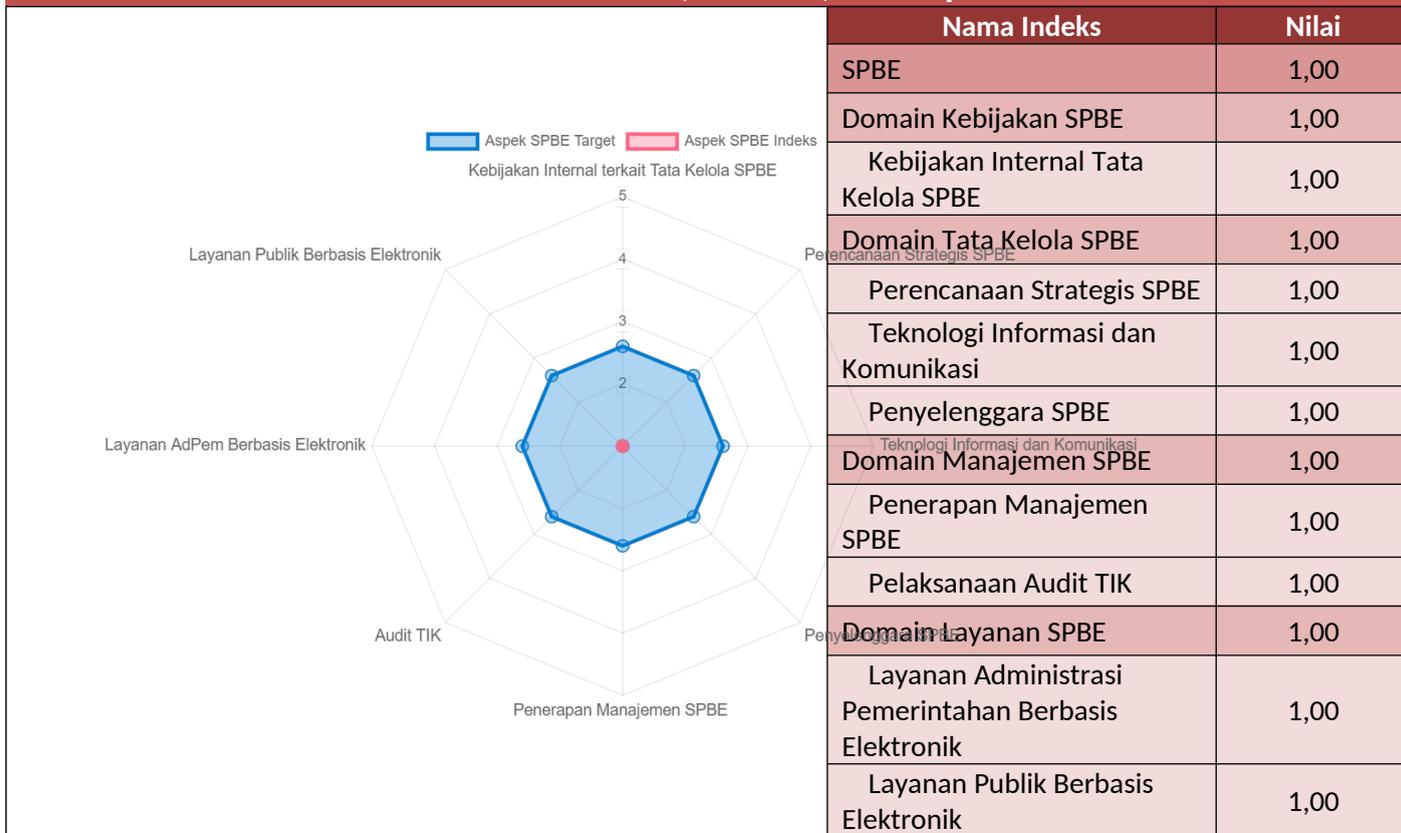
| Predikat Indeks SPBE | | |
|----------------------|--------------|-------------|
| NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT |
| 1 | 4,2 - 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 - < 4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 - < 3,5 | Baik *) |
| 4 | 1,8 - < 2,6 | Cukup |
| 5 | < 1,8 | Kurang |

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

| Indeks | Rata-rata nilai | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------|--------------|----------|-----------|------|
| | Nasional | Kementerian | LPNK | Lembaga Lain | Provinsi | Kabupaten | Kota |
| SPBE | 2,24 | 2,84 | 2,77 | 2,10 | 2,46 | 2,11 | 2,29 |
| Domain Kebijakan | 2,21 | 2,68 | 2,81 | 1,89 | 2,26 | 2,13 | 2,23 |
| Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola | 2,21 | 2,68 | 2,81 | 1,89 | 2,26 | 2,13 | 2,23 |
| Domain Tata Kelola | 1,89 | 2,61 | 2,56 | 1,83 | 2,14 | 1,73 | 1,91 |
| Perencanaan Strategis | 1,77 | 2,36 | 2,47 | 1,80 | 1,91 | 1,62 | 1,78 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2,00 | 2,86 | 2,71 | 1,86 | 2,36 | 1,82 | 1,99 |
| Penyelenggaraan SPBE | 1,93 | 2,59 | 2,46 | 1,82 | 2,16 | 1,78 | 2,02 |
| Domain Manajemen | 1,23 | 1,50 | 1,39 | 1,25 | 1,31 | 1,17 | 1,26 |
| Penerapan Manajemen SPBE | 1,26 | 1,53 | 1,37 | 1,25 | 1,35 | 1,20 | 1,29 |
| Audit TIK | 1,17 | 1,43 | 1,44 | 1,23 | 1,22 | 1,11 | 1,17 |
| Domain Layanan SPBE | 2,81 | 3,49 | 3,37 | 2,62 | 3,10 | 2,66 | 2,88 |
| Administrasi Pemerintahan | 2,86 | 3,50 | 3,48 | 2,86 | 3,14 | 2,71 | 2,88 |
| Layanan Publik | 2,74 | 3,49 | 3,21 | 2,26 | 3,04 | 2,59 | 2,88 |



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikarenakan tidak disertakan data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**
Semua kebijakan internal Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola di Pemerintah Provinsi Maluku Utara bisa digambarkan masih berupa konsep kebijakan yang belum ada atau sudah tersedia karena bukti data dukung dokumen yang terkait Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola tidak ada disertakan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikarenakan tidak disertakan data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini

- **Kekuatan**
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**
Semua dokumen terkait Aspek Perencanaan Strategis SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ada disertakan atau diunggah sehingga tidak bisa dinilai kelengkapan isi dari dokumen tersebut.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikarenakan tidak disertakan data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan
Semua dokumen terkait Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ada disertakan atau diunggah sehingga tidak bisa dinilai kelengkapan isi dari dokumen tersebut.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dikarenakan tidak disertakannya data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan
Semua dokumen terkait Aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ada disertakan atau diunggah sehingga tidak bisa dinilai kelengkapan isi dari dokumen tersebut.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikarenakan tidak disertakan data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan
Semua dokumen terkait Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ada disertakan atau diunggah sehingga tidak bisa dinilai kelengkapan isi dari dokumen tersebut.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikarenakan tidak disertakan data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini.

- Kekuatan
Pada Aspek Audit TIK belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan
Semua dokumen terkait Aspek Audit TIK di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ada disertakan atau diunggah sehingga tidak bisa dinilai kelengkapan isi dari dokumen tersebut.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikarenakan tidak disertakan data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dari penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara ada menyebutkan sudah menggunakan sampai pada kapabilitas fungsi teknis kolaborasi seperti Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, dan Layanan Kepegawaian. Selain itu ada layanan yang disebutkan sudah sampai kapabilitas fungsi teknis interaksi dan transaksi seperti Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan Layanan Kinerja Pegawai. NAMUN tidak disertakan dengan data dukung dokumen yang terkait hal tersebut sehingga tingkat kematangan mengenai penggunaan Layanan Administrasi

Pemerintahan Berbasis Elektronik tersebut hanya memberikan layanan informasi yang belum atau sudah tersedia.

- Kelemahan

Semua dokumen terkait Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak ada disertakan atau diunggah sehingga tidak bisa dinilai kelengkapan isi dari dokumen tersebut. selain itu dalam penjelasannya juga ada beberapa layanan yang belum digunakan dengan baik atau kapabilitas fungsi teknis hanya memberikan layanan informasi seperti Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik seluruhnya belum terpenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dikarenakan tidak disertakan data dukung yang terkait dengan indikator-indikator yang ada pada aspek ini.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

- Kelemahan

Semua dokumen terkait Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik tidak ada disertakan atau diunggah sehingga tidak bisa dinilai kelengkapan isi dari dokumen tersebut. selain itu dalam penjelasannya juga ada beberapa layanan yang belum digunakan atau belum tersedia dengan baik atau kapabilitas fungsi teknis hanya memberikan layanan informasi seperti Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, dan Layanan Sektor Pelayanan Publik lainnya

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Maluku Utara, sudah dapat menggambarkan predikat KURANG dalam penerapan SPBE, sebagaimana keunggulan dan kelemahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Dari penjelasan yang diberikan (tanpa tersedia dokumen pendukung) pada masing-masing indikator sulit untuk memunculkan keunggulan penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Tidak tersedianya dokumen pendukung ini menjadikan seluruh indikator dari semua aspek berada pada kematangan paling rendah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hal ini menjadi kelemahan dari penerapan SPBE di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan penjelasan yang disertakan, saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara sedang menetapkan peraturan kebijakan internal terkait SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Ini menjadi suatu langkah strategis dalam mengakselerasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain itu pembentukan Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan agar segera diwujudkan karena tim ini memegang peranan strategis juga dalam menyelenggarakan SPBE. Mengingat lemahnya ketersediaan dokumen pendukung sehingga diperlukan juga pengelolaan dokumen-dokumen pendukung SPBE melalui penerapan sistem kearsipan dinamis yang baik.

Peran Tim Koordinasi SPBE sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam penerapan TIK di dalam menjalankan proses penyelenggaraan di internal Instansi. Peran strategis, taktis dan operasional perlu dipetakan dan diorganisasi kembali ke setiap OPD/Unit Kerja instansi pusat, sehingga tanggung jawab penerapan SPBE di masing-masing instansi tidak hanya diampu oleh Dinas Kominfo/Unit Pengelo TIK Instansi Pusat saja. Dokumen kebijakan SPBE merupakan pedoman utama dalam penerapan SPBE. Berawal dari Kebijakan SPBE maka dapat selanjutnya untuk menyusun Arsitektur SPBE dengan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB. Setelah menyusun Arsitektur SPBE yang sesuai dengan pedoman Nasional maka selanjutnya adalah melakukan perencanaan penerapan SPBE melalui Peta Rencana SPBE. Peta Rencana SPBE disusun secara lengkap tanpa terkecuali serta mengikuti alur Arsitektur yang diharapkan. Setelah seluruh kegiatan terencana maka mulai dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut dan dapat dimonitoring output dari setiap perencanaan dari Peta Rencana SPBE tersebut.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

| No | Indikator | Nilai Tingkat Kematangan |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah | 1 |
| 2 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah | 1 |
| 3 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data | 1 |
| 4 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE | 1 |
| 5 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data | 1 |
| 6 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah | 1 |
| 7 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi | 1 |
| 8 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi | 1 |
| 9 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK | 1 |
| 10 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah | 1 |
| 11 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 |
| 12 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 |
| 13 | Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE | 1 |
| 14 | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE | 1 |
| 15 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 1 |
| 16 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | 1 |
| 17 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 |
| 18 | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah | 1 |
| 19 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 |
| 20 | Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE | 1 |
| 21 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE | 1 |
| 22 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 1 |
| 23 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | 1 |
| 24 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK | 1 |
| 25 | Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE | 1 |
| 26 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan | 1 |
| 27 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan | 1 |
| 28 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE | 1 |
| 29 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE | 1 |
| 30 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE | 1 |
| 31 | Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE | 1 |
| 32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan | 1 |
| 33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran | 1 |
| 34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan | 1 |
| 35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 1 |
| 36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian | 1 |
| 37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis | 1 |
| 38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah | 1 |
| 39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah | 1 |
| 40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 1 |
| 41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai | 1 |
| 42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 1 |
| 43 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka | 1 |
| 44 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | 1 |
| 45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 | 1 |
| 46 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 | 1 |
| 47 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 | 1 |